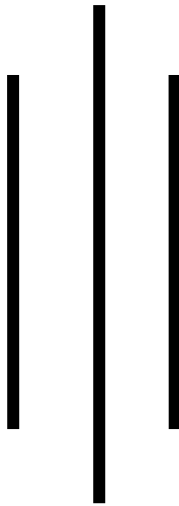




**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2026**



Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)
Kabupaten Probolinggo tahun 2025

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wa barakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Probolinggo yang saya hormati dan cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

Penyusunan dan penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab kami sebagai Bupati kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga merupakan tanggung jawab pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019, Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kepala Daerah wajib menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Probolinggo sangat terkait dengan visi-misi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029.

VISI :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO SAE (SEJAHTERA, AMANAH-RELIGIUS SERTA EKSIS BERDAYA SAING)”

Visi Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025-2029. Penjabaran dari visi tersebut akan dijelaskan melalui tabel berikut ini:

Tabel Penjelasan Pokok-Pokok Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)	Sejahtera	Keadaan dimana terwujud pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dimana pembangunan manusia di Kabupaten Probolinggo ditandai dengan terwujudnya individu-individu masyarakat yang sejahtera baik secara sosial maupun ekonomi, dalam lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan. Secara eksplisit, makna "sejahtera" merujuk pada Kabupaten Probolinggo yang "SAE" (baik), baik dari segi kualitas sumber daya manusianya, khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan (SAE Pendidikan dan Kesehatan) maupun aspek ketahanan sosialnya (SAE Sosial).
	Amanah Religius	Keadaan di mana Pemerintah Kabupaten Probolinggo mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai anti-korupsi sehingga menjadi pemerintah yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah daerah juga mampu menyelenggarakan pembangunan secara efektif melalui kolaborasi yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		pembangunan sehingga terwujud pemerintahan yang SAE (baik)
	Eksis-Berdaya Saing	Keadaan ini merupakan hasil dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan lingkungan sosial yang sehat dengan budaya yang maju. Menggunakan cara- cara baru dan inovatif untuk perbaikan Pembangunan. Memperhatikan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam setiap langkah pembangunan. Kabupaten Probolinggo memiliki daya saing yang kuat dan dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam keberhasilan capaian pembangunannya. SAE ekonomi dan infrastrukturnya , yaitu maju secara ekonomi, didukung infrastruktur yang berkualitas, merata, serta berpijak pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan

Untuk mewujudkan visi tersebut telah disusun misi sebagai berikut :

MISI :

Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan, memberikan arah yang jelas, sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang

telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel Keterkaitan Pokok – Pokok Visi Terhadap Misi

No.	Pokok – Pokok Visi	Misi
1.	Sejahtera	Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau
		Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas
2.	Amanah - Religius	Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif
3.	Eksis – Berdaya Saing	Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata
		Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 merupakan laporan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Selama tahun 2025 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, berada pada posisi 7° 40' s/d 8° 10' Lintang Selatan (LS) dan 112° 50' s/d 113° 30' Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65

Ha atau $\pm 1.696,16\text{Km}^2$.

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Selat Madura
- Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang
- Sebelah Utara bagian tengah terdapat Daerah Otonom yaitu Kota Probolinggo.

Dilihat dari topografinya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari Barat ke Timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Mempunyai ciri-ciri fisik yang menggambarkan kondisi geografis, yaitu terdiri dari dataran rendah pada bagian utara, lereng-lereng gunung pada bagian tengah dan dataran tinggi pada bagian selatan, dengan tingkat kesuburan dan pola penggunaan tanah yang berbeda.

Dilihat dari ketinggiannya berada pada 0 – 2.500 M di atas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°C – 30°C . Hal ini yang menyebabkan tanahnya berupa tanah vulkanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayur-sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang mempunyai ketinggian antara 750 – 2.500 M di atas permukaan laut.

Tanah yang membujur dari Barat ke Timur di bagian Selatan yang berada di kaki pegunungan Argopuro dan berketinggian antara 150 – 750 M di atas permukaan laut sangat cocok untuk tanaman kopi, buah-buahan seperti durian, alpukat dan buah-buahan lainnya. Wilayah yang sangat tepat untuk tanaman buah-buahan ini adalah Kecamatan Krucil dan Tiris.

Bentuk permukaan daratan di Kabupaten Probolinggo di klasifikasikan atas 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a. Dataran rendah dan tanah pesisir dengan ketinggian 0 – 100 M diatas permukaan laut, daerah ini membentang di sepanjang pantai utara mulai dari Barat ke Timur kemudian membujur ke Selatan;
- b. Daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – 1.000 M diatas permukaan laut, daerah ini terletak di wilayah bagian Tengah sepanjang kaki

Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger serta pada bagian Utara sisi Timur sekitar Gunung Lamongan;

- c. Daerah pegunungan dengan ketinggian diatas 1.000 M dari permukaan laut, daerah ini terletak di sebelah Barat Daya yaitu sekitar Pegunungan Tengger dan sebelah Tenggara yaitu disekitar Pegunungan Argopuro.

Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap Tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Probolinggo terbagi atas 3 klasifikasi kondisi curah hujan yakni Probolinggo bagian Tenggara memiliki intensitas curah hujan sangat tinggi yakni >400 mm seperti terpantau di Kec. Gading, Krucil dan Tiris. Probolinggo bagian tengah memiliki intensitas curah hujan tinggi yakni 301-400 mm meliputi Kec. Sukapura, Sumber, Lumbang, Banyuwanyar, Gending, Maron dan Pakuniran. Sedangkan wilayah lain terpantau memiliki intensitas curah hujan cukup menengah yakni 201-300 mm. Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah Tenggara ke Barat Laut biasa disebut “**Angin Gending**”.

Secara hidrografi terdapat 25 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sungai terpanjang adalah Rondoningo dengan panjang 95,2 kilometer. Sedangkan sungai terpendek adalah Afour Bujel dengan panjang hanya 2 kilometer saja. Selain itu juga terdapat Danau/Ranu yaitu Danau/Ranu Segaran, Danau/Ranu Agung, Danau/Ranu Betok, Danau/Ranu Merah dan Danau/Ranu Duwes.

Kabupaten Probolinggo, secara yuridis formal dibentuk dengan Undang-Undang Nomor :12 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan, 325 Desa dan 5 Kelurahan, 1.380 Dusun, 1.642 Rukun Warga (RW) dan 5.864 Rukun Tetangga (RT).

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 - 2024, menurut hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 – 2024, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK HASIL REGISTRASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	URAIAN	Ket	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Laki – Laki	Jiwa	571.412	575.834	581.973	592.531	600.818
2.	Perempuan	Jiwa	585.996	591.675	598.394	608.400	617.116
	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.157.408	1.167.509	1.180.367	1.200.931	1.217.934

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo

B. Kondisi Ekonomi

Produk Unggulan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, didapatkan beberapa potensi Produk Unggulan Daerah Kabupaten Probolinggo, antara lain :

- 1) Produk Unggulan Daerah Sub sektor Pertanian, menunjukkan hasil prioritas Produk Unggulan Daerah adalah pada jenis tanaman bawang merah, alpukat, mangga, padi, kentang dan bawang merah. Yang paling diprioritaskan adalah **bawang merah** dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Tongas, Sumberasih, Wonomerto, Bantaran, Leces, Dringu, Tegalsiwalan, Banyuanyar, Gending, Maron, Pajarakan, Krejengan dan Kraksaan.
- 2) Produk Unggulan Daerah Sub sektor Perkebunan, menunjukkan hasil prioritas Produk Unggulan Daerah adalah pada jenis **tanaman tembakau** dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Krejengan, Paiton, Kotaanyar, Pakuniran, Besuk, Kraksaan dan Gending.
- 3) Produk Unggulan Daerah Sub sektor Perikanan, menunjukkan hasil prioritas Produk Unggulan Daerah adalah pada jenis perikanan udang vaname, ikan kembung dan bandeng. Yang paling diprioritaskan adalah **udang vaname** dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Dringu, Tongas, Sumberasih, Gending, Pajarakan, Kraksaan dan Paiton.
- 4) Produk Unggulan Daerah Sub sektor Peternakan, menunjukkan hasil prioritas Produk Unggulan Daerah adalah pada jenis ternak sapi potong, ayam buras dan ras. Yang paling diprioritaskan adalah **sapi potong** dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Krucil dan Sukapura.
- 5) Produk Unggulan Daerah Subsektor Pariwisata, menunjukkan hasil

prioritas Produk Unggulan Daerah berupa kawasan pariwisata alam antara lain Pantai Bentar, Pantai Binor Paiton, Bermi, Wisata Gunung Bromo, Pantai Duta Paiton dan Arung Jeram Kali Pekalen. Pariwisata Budaya antara lain Candi Jabung, Upacara Adat Kasada dan Upacara Arung Sesaji.

C. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Secara umum capaian kinerja makro Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Probolinggo

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,85	71,65	1,13
2	Angka Kemiskinan	16,45	16,31	-0,65
3	Angka Pengangguran	3,00	2,92	-2,67
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,82	5,34	10,79
5	Pendapatan Per Kapita	45.675.150.000	49.412.130.000	8,18
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,339	0,377	11,21

D. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan dilaksanakan untuk meningkatnya angka partisipasi sekolah, peningkatan partisipasi masyarakat di urusan pendidikan, peningkatan kualitas proses pembelajaran, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta pengawas dan penilik. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pendidikan**

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan tercapai sebesar 92,31%;

- b) Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar tercapai sebesar 99,32%;
- c) Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan tercapai sebesar 52,15%;
- d) Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik tercapai sebesar 34,60%.
- e) Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik sebesar 32,33%

**CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN PROBOLINGGOTAHUN 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)		KETERANGAN
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
1	Pendidikan anak usia dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	30.449.638.000	90.56	27.436.773.607	
2	Pendidikan dasar	Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	143.003.978.442	99.16	138.675.063.844	
3	Pendidikan kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	5.911.650.000	94.24	5.890.044.120	

2. URUSAN KESEHATAN

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang sehat, mengembangkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih sehat, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta meningkatkan upaya pencegahan dan

penanganan penyakit. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Kesehatan, RSUD Waluyo Jati Dan RSUD Tongas.**

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Angka Kematian Ibu sebesar 0,07;
- b) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita sebesar 10,36%
- c) Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar sebesar 91,23%
- d) Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar sebesar 100%
- e) Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar sebesar 98,69%;
- f) Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar sebesar 95,88%;
- g) Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar sebesar 95,77%;
- h) Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Sesuai Standar sebesar 87,64%;
- i) Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar sebesar 96,68%;
- j) Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar sebesar 98,02%;
- k) Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar sebesar 100%;
- l) Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar sebesar 100%
- m) Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar sebesar 100%
- n) Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Sesuai Standar sebesar 100%

**PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)		Keterangan
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	4.605.706.550	91,23	4.401.044.768	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	119.060.000	100,00	87.810.000	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	501.112.000	98,69	480.226.129	
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	140.148.000	95,88	121.321.960	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	1.993.900.000	95,83	1.933.951.638	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	626.893.600	87,64	571.134.498	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	260.048.000	96,68	152.546.207	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	201.840.000	98,02	111.411.881	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	244.960.000	100,00	158.139.540	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	452.135.000	100,00	419.921.340	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	1.357.619.000	100	1.261.893.210	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	100	595.960.000	100,00	537.973.478	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)		Keterangan
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
	daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan					

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana dan sarana dasar permukiman merupakan modal penting masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Sedangkan pengembangan prasarana irigasi ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan air untuk kepentingan persawahan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**.

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 0,44;
- Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota sebesar 74,95;
- Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota sebesar 59,38;
- Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 75,21%;
- Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir sebesar 100%;
- Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar 100%;
- Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kabupaten/Kota sebesar 100%;
- Persentase Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 0;
- Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi sebesar 50%.

- j) Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/ Kota sebesar 92,11%

**PENCAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)	
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2.575.000.000	100	2.528.240.720
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	2.535.000.000	100	2.362.232.509

4. URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan urusan wajib perumahan diarahkan untuk peningkatan lingkungan permukiman melalui peningkatan dan pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana publik. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan**.

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni sebesar 100%;
- b) Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 Ha yang Ditangani sebesar 100%;
- c) Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani sebesar 99,72%;
- d) Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) sebesar 0%;

**PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)	
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	292.486.640	97,53	285.260.601
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah **Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku sebesar 0;
- Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100%
- Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan sebanyak 33,33%;
- Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebanyak 23.625 orang;
- Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebanyak 5.197 orang;

- f) Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebesar 90,57%;

**PENCAPAIAN SPM BIDANG TRANTIBUM (SATPOL PP)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Target (2025)		Realisasi (2025)	
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Warga terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	5.400.000	48.31	2.608.500
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Warga yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran	100	29.150.000	95.39	27.807.550

**PENCAPAIAN SPM BIDANG TRANTIBUM (BPBD)
KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)		Sumber Dana
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Desa/Kelurahan Yang Mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100	56.965.750	91,14	51.918.360	DAU, Silpa
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Capaian Desa/Kelurahan Yang Mendapatkan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	666.301.500	96,63	643.864.025	Pajak Rokok, DAU Pend.
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Capaian Korban Bencana yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	100	254.236.472	99,11	251.963.679	Silpa, Pajak Rokok

6. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan urusan wajib sosial diarahkan untuk peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, peningkatan pelayanan kehidupan beragama, peningkatan koordinasi pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan keswadayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa/ kelurahan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Hasil yang dicapai antara lain :

- a) Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti sebesar 70,87%;
- b) Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti sebesar 100%;
- c) Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 83,83%
- d) Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti 100%
- e) Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota 100%
- f) Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 91,58%

PENCAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Target (2025)		Realisasi (2025)	
			(%)	(Rp.)	(%)	(Rp.)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	439.042.000	100	432.000.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	23.344.000	100	23.110.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang	100	768.000.000	100	768.000.000

	terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	720.000.000	100	720.000.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	21.300.000	100	21.181.500

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

7. KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaraan urusan wajib ketenagakerjaan diarahkan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Tenaga Kerja**. Hasil yang dicapai antara lain :

- Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja adalah 100%;
- Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah 100%;
- Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah 100%;

8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak – haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**.

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100%;
- b) Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif sebesar 100%;

9. PANGAN

Penyelenggaraan urusan wajib pangan diarahkan untuk meningkatkan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, memantapkan distribusi pangan dan cadangan pangan, meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan serta percepatan penganeekaragaman pangan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Ketahanan Pangan**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 9,15%.

10. PERTANAHAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah 100%
- b) Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 0,03%
- c) Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan 20,83%

11. LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan urusan wajib lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan/atau pencegahan kerusakan lingkungan hidup,

pengelolaan persampahan dan pertamanan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Lingkungan Hidup**. Hasil yang telah dicapai antaralain :

- a) Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 70,37%;
- b) Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani 17,42%;

12. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Penyelenggaraan urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan sebesar 95,35%;
- b) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 43,60%
- c) Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan sebesar 100%
- d) Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik sebanyak 98,83%
- e) Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 100%
- f) Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 100%
- g) Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan 91,93%

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Penyelenggaraan urusan wajib pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan penanganan yang profesional pada setiap bidang pemberdayaan masyarakat. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Pengentasan Desa Tertinggal sebesar 100%;
- b) Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri sebesar 64%;
- c) Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa 96,48%

14. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Penyelenggaraan urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan untuk peningkatan pelayanan keluarga berencana serta menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program keluarga berencana. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun adalah 103,57;
- b) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) sebesar 72,68 %;
- c) Persentase Kebutuhan ber-Keluarga Bencana yang Tidak Terpenuhi (unmet need) sebesar 75,88%.

15. PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan urusan wajib perhubungan diarahkan untuk meningkatkan sistem pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, merata dan terjangkau masyarakat luas. Mewujudkan lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Perhubungan**.

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Konektivitas Kabupaten/Kota adalah 0,95
- b) Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota adalah 0,21
- c) Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) 0

16. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan urusan wajib komunikasi dan informatika diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan, pembinaan dan pengendalian sistem komunikasi dan informasi daerah. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Komunikasi, Informatik, Statistik Dan Persandian**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sebesar 57,69%;
- b) Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi adalah 76,67%;
- c) Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 92,62%.

17.KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Penyelenggaraan urusan wajib koperasi dan usaha mikro dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing koperasidan usaha mikro, peningkatan struktur permodalan koperasidan usaha mikro serta peningkatan manajemen koperasi dan usaha mikro. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi sebesar 11,17%;
- b) Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal tercapai sebesar 77,37%

18.PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan urusan wajib penanaman modal diarahkan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan perijinan, merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis, penyelenggaraan perijinan dan penanaman modal. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota sebesar -68,34%;
- b) Realisasi Total Terhadap Target Investasi sebesar 284,96%.

19.KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan urusan wajib kepemudaan dan olah raga diarahkan untuk mengembangkan kreatifitas, kewirausahaan dan kemandirian serta meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, pengembangan kebijakan manajemen, pemasyarakatan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**. Hasil

yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri sebesar 25%;
- b) Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar 25,32%;
- c) Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Pelatihan Daerah Provinsi sebanyak medali 12,24

20. STATISTIK

Penyelenggaraan urusan wajib statistik diarahkan untuk memantau hasil kegiatan pembangunan daerah, melalui kumpulan angka-angka. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**. Hasil yang dicapai antara lain :

- a) Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah sebesar 91,26%;

21. PERSANDIAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian**. Hasil yang dicapai antara lain :

- a) Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah 46,30

22. KEBUDAYAAN

Penyelenggaraan urusan wajib kebudayaan dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pembangunan, pengembangan, pelestarian, serta pengelolaan kekayaan dan keragaman nilai budaya yang ada di masyarakat. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**. Hasil yang telah dicapainya antara lain :

- a) Persentase Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan sebanyak 100%;
- b) Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah sebanyak 0,93%.

23. PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan diarahkan untuk percepatan

peningkatan derajat pendidikan masyarakat. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat sebesar 63,42;
- b) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah 15,50

24. KEARSIPAN

Penyelenggaraan urusan wajib kearsipan diarahkan untuk untuk meningkatkan manajemen pengelolaan kearsipan daerah guna menunjang proses kegiatan administrasi negara dan manajemen birokrasi, sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan bukti penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang nyata, lengkap dan benar. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional sebesar 100;

URUSAN PILIHAN

25. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan ketahanan pangan, melalui peningkatan produksi dan pengembangan kawasan perikanan, serta pemulihan daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Perikanan**.

Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya adalah 99,71%;
- b) Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapasitas/tahun) adalah 22,44

26. PARIWISATA

Penyelenggaraan urusan pilihan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui industri pariwisata dan menggerakkan usaha-usaha peningkatan arus kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata**. Hasil yang telah dicapai adalah

- a) Persentase Investasi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

adalah 0,12%;

- b) Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing adalah 11,51%;
- c) Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota adalah 0,70%;

27. PERTANIAN

Penyelenggaraan urusan pilihan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, memantapkan kemandirian petani, meningkatkan produktifitas ternak, serta mencegah dan menanggulangi penyakit ternak. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Pertanian**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar -3,63%;
- b) Peningkatan Produksi Hortikultura sebesar 5,98%;
- c) Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan sebesar -35,06%;
- d) Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (diperoleh dari Surveilance Penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 100%.

28. PERDAGANGAN

Penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan dilaksanakan untuk mengembangkan produk dan pasar; mengembangkan jaringan informasi pasar, serta perluasan pangsa pasar baik lokal, regional, maupun luar negeri, meningkatkan pengawasan peredaran barang dan perlindungan konsumen, serta meningkatkan program kemitrologian. Hasil yang telah dicapai antara lain:

- a) Persentase Alat Ukur Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku sebesar 55,93%;

29. PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan urusan pilihan perindustrian diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat di bidang industri kecil dan menengah, mencitrakan kawasan potensial industri melalui pengembangan klaster industri, meningkatkan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Probolinggo. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah sebesar 0%;

- b) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) sebesar 0,11%;
- c) Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota adalah 23,67%;
- d) Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor adalah 1,26%;

URUSAN FUNGSI PENUNJANG

30. PERENCANAAN

Penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, diarahkan untuk peningkatan mekanisme perencanaan pembangunan secara transparan, partisipatif dan akuntabel. Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah**,. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 82,35%;

31. KEUANGAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya sebesar 34,24%;
- b) Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 17,67%;
- c) Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun N sebesar 6,73%.
- d) Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik 30,06%

32. KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**. Hasil yang telah dilaksanakan antara lain:

- a) Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) sebesar 72,48%;

33. MANAJEMEN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan sebesar 45,07%

34. PENGAWASAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Inspektorat** Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 4,00
- b) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 4,00
- c) Manajemen Risiko Indeks 4,00
- d) Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran N-1 42,86

35. PENGADAAN

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**. Hasil yang telah dilaksanakan adalah :

- a) Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ) sebesar 35,56%;
- b) Pemanfaatan Sistem Pengadaan sebesar 25,59%;
- c) Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) sebesar 23,79%.

36. HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Bagian Hukum**. Hasil yang

telah dicapai antara lain :

- a) Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun N adalah tepat waktu
- b) Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N sebesar 27,27%.

37. PELAYANAN PUBLIK

Perangkat daerah yang melaksanakan adalah **Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah**. Hasil yang telah dicapai antara lain :

- a) Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar 95,77

E. TUGAS PEMBANTUAN

Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 tidak mendapatkan penugasan untuk melaksanakan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

F. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

- 1) Indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Probolinggo mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 (duabelas) kali berturut-turut pada tahun 2013 s/d 2024. Sedangkan pada Tahun 2025, capaiannya saat ini belum dapat diketahui karena menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
- 2) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), berdasarkan hasil evaluasi/penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari KemenPAN dan RB Republik Indonesia pada tahun 2014 nilainya sebesar 53,06 dengan predikat CC, tahun 2015 nilainya sebesar 56,09 dengan predikat CC, tahun 2016 nilainya sebesar 60,10 dengan predikat B dan pada Tahun 2017 dengan realisasi nilai/predikat Tahun 2017 sebesar 70,04 (BB), tahun 2018 mendapat hasil penilaian sebesar 70,12 dengan predikat BB dan ditahun 2019 mendapat peningkatan nilai menjadi 71,50 (predikat BB) dalam kategori Baik (B). Sedangkan untuk Tahun 2020 mendapat hasil penilaian

sebesar 72,41 dengan predikat BB dan Tahun 2021 mendapat hasil penilaian 68,01 dalam kategori Baik (B). Tahun 2022 mendapat hasil penilaian 68,68 dalam kategori Baik (B). Tahun 2023 mendapat hasil penilaian 67,43 dalam kategori Baik (B). Tahun 2024 mendapat hasil penilaian 67,11 dalam kategori Baik (B). dan di tahun 2025 mendapat hasil 67,38. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di Kabupaten Probolinggo menunjukkan kenaikan dibanding Tahun 2024.

- 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7- 2109 Tahun 2025 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2024 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Probolinggo mendapatkan skor 3,1916 dengan status Sedang dan peringkat 111 dari 395 Kabupaten Seluruh Indonesia. Sedangkan untuk hasil EPPD Tahun 2025 terhadap LPPD Tahun 2024 belum rilis oleh Kementerian Dalam Negeri.

G. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Tabel Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
4			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	422.849.901.243,00	443.706.848.348,44
4.2	Pendapatan Transfer	2.017.640.727.000,00	2.066.120.505.472,00
4.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	15.695.822.024,00	15.695.675.809,92
	JUMLAH	2.440.490.628.243,00	2.510.468.212.820,44
5			
5.1	Belanja Operasi	1.867.848.912.162,33	1.786.279.631.879,00
5.2	Belanja Modal	229.502.457.373,79	203.928.981.152,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.505.000.000,00	10.129.741.334,00
5.4	Belanja Transfer	504.949.251.000	491.842.283.000,00
	JUMLAH	2.613.805.620.536,12	2.492.180.637.365,00
	SURPLUS/DEFISIT	(173.314.992.293,12)	18.287.575.455,44
6			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	173.314.992.293,12	173.371.603.633,96

6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	173.314.992.293,12	173.371.603.633,96
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	191.659.179.089,40

H. INOVASI DAERAH

Program Inovasi Daerah Andalan yang ada di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2025 antara lain :

1. Klinik Aspirasi adalah wadah untuk menerima keluhan dari Masyarakat. Tidak hanya bagi masyarakat sipil saja, tapi juga ASN yang mempunyai keluhan. Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo bertugas secara piket di masing-masing komisi untuk menunggu masyarakat datang mengadukan keluhannya.
2. Gerai Kemudahan Layanan Pajak Daerah ditujukan untuk menjangkau daerah terpencil atau masyarakat yang terkendala jarak dan waktu dalam mendapatkan pelayanan pajak daerah.
3. Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Terintegrasi meliputi Pajak Kendaraan Dinas, Sewa Aset, lelang bongkaran Aset, dan Tanah
4. Suatu wadah untuk mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan, Menumbuhkan budaya inovasi di lingkungan pemerintah dan masyarakat serta database inovasi daerah
5. Mengoptimalkan layanan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru secara komprehensif dan berkelanjutan untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS)
6. "Word Tower adalah permainan edukatif yang dirancang Menyusun untuk meningkatkan literasi berbahasa secara interaktif dan menyenangkan. Pada inovasi ini menggabungkan elemen game berbasis tantangan kata dengan konsep menara bertingkat, dimana setiap kata yang berhasil di jawab lalu disusun oleh pemain akan menjadi sebuah menara. Semakin banyak kata yang terjawab maka

akan semakin tinggi menara yang di bangun sehingga memberikan motivasi kepada para pemain.

7. Praktik baik GUYUB-BERADAB yang dikembangkan oleh SMP Negeri 1 Kotaanyar merupakan jawaban konkret Kolaboratif Berbasis sis Digital terhadap berbagai tantangan pendidikan pascapandemi, mulai dari penurunan kehadiran siswa, lemahnya karakter, rendahnya keterlibatan orang tua, hingga munculnya kembali kasus perundungan yang tidak dilaporkan.
8. Peta Tunjuk Nyala adalah media pembelajaran interaktif berbentuk peta Indonesia yang dirancang untuk memperkenalkan keberagaman budaya di berbagai wilayah secara menyenangkan dan edukatif.
9. Media pembelajaran yang diharapkan mampu membantu Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam melestarikan Kesenian Tari Glipang.
10. OptiBox "Petualangan Cahaya" merupakan media ajar inovatif yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran IPAS pada lingkup materi konsep dasar cahaya dan sifat-sifatnya pada siswa kelas V Sekolah Dasar.
11. Pemanfaatan ADIRA (Asesmen Digital Berbasis Android) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses evaluasi pembelajaran melalui pemanfaatan asesmen digital berbasis android yang dikembangkan dengan platform Kodular.io.
12. Media TANGKAS menggabungkan permainan tradisional ular tangga yang telah dimodifikasi secara tematik dengan soal soal Statistika, serta kuis interaktif digital berbasis Canva Code yang dapat diakses melalui gawai.
13. RUMPI (RUMah Pintar Interdisipliner) adalah sebuah media pembelajaran interaktif yang diwujudkan dalam bentuk miniatur rumah edukatif 3D. Inovasi ini memiliki empat sisi pembelajaran tematik, di mana setiap sisinya mengintegrasikan materi dari berbagai mata pelajaran secara kontekstual dan berkesinambungan.
14. Inovasi "Upaya Mempertahankan Sumber Air Bersih Melalui Program GENCERLING diharapkan mampu menjawab tantangan strategis terkait penurunan kualitas dan ketersediaan air bersih di Kabupaten Probolinggo. Melalui pendekatan berbasis pendidikan dasar, program ini

- berhasil membangun kesadaran kolektif dan kapasitas guru serta siswa dalam menjaga ketahanan air secara berkelanjutan.
15. MOJANG (Monitoring Kinerja dan Anggaran) merupakan suatu sistem berbasis web yang menyediakan fitur pemantauan pencapaian kinerja dan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. MOJANG dikembangkan sejak tahun 2021 dengan nama NPD (Nota Pencairan Dana) berdasarkan kebutuhan pelaporan, kemudian senantiasa berkembang sesuai perkembangan sistem pemerintahan, sehingga bersifat dinamis dan adaptif.
 16. Gasken Si Petilar dilakukan secara mobile untuk mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat dan juga sebagai wadah promosi layanan-layanan kesehatan yang ada di dalam UPT Puskesmas Dringu sehingga masyarakat dapat dengan mudah melakukan pemeriksaan kesehatannya dan sadar akan pentingnya memahami resiko penyakit tidak menular.
 17. GERET ASIIN MANIS (Gerakan Bersama Kendalikan Hipertensi dan Kencing Manis) adalah program digitalisasi pelayanan yang dirancang untuk mempermudah proses pemantauan dan pengendalian Hipertensi dan Kencing Manis (Diabetes Militus).
 18. Gerpas TBC di Kecamatan Bantaran sangat membantu dalam penemuan suspek TBC. UPT Puskesmas Bantaran memiliki kader TBC pada setiap desa (10 desa) untuk menemukan suspek TBC yang selanjutnya akan dilakukan skrining.
 19. Getras TB inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan temuan kasus TB secara dini, memberdayakan masyarakat dalam deteksi dan pencegahan TB dan menurunkan angka penularan TB melalui pendekatan aktif dan inklusif.
 20. Go Healthy Club adalah cara menjalani kehidupan yang dapat meminimalisir risiko terkena penyakit serius hidup sehat adalah hidup yang bebas dari semua masalah rohani ataupun masalah jasmani (fisik) di lingkungan PKM Wangkal.
 21. Pemberdayaan kader TBC untuk upaya peningkatan penemuan kasus TBC dan upaya pencegahan pasien TBC putus minum obat menuju Indonesia Eliminasi TBC tahun 2030.

22. Deteksi Dini Penyakit Jantung pada Penderita Diabetes Melitus dan Hipertensi dengan Pemeriksaan Rekam Jantung dan/atau Prediksi Risiko ITM dengan Carta.
23. Inovasi Jempol Sac adalah suatu upaya mendekatkan akses pelayanan bagi penderita diabetes militus dengan cara kunjungan rumah atau pendampingan dari petugas kesehatan desa apabila ditemukan penderita dengan komplikasi akan diberikan rujukan internal ke puskesmas untuk mendapatkan pelayanan lanjutan.
24. Inovasi Pelayanan keschatan tradisional berbasis UMKM dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, termasuk potensi ekonomi dari sektor keschatan tradisional, keinginan untuk melestarikan kearifan lokal, serta kebutuhan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses.
25. Si Susi Ceting adalah suatu upaya/ sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu, suami dan keluarga dalam pemberian ASI pada bayinya, di Ruang Nifas Puskesmas. Sclanjutnya pemantauan dan konsultasi ASI diteruskan oleh tenaga kesehatan/ Bidan Desanya masing-masing.
26. Inovasi yang bertujuan untuk Mewujudkan pelayanan yang cepat, tanggap, dan responsive bagi seluruh konsumen RS Waluyo Jati, memastikan pemberian service excellent bagi scluruh konsumen RS Waluyo Jati serta meningkatkan kepuasan konsumen.
27. Melalui PESAN PUBERS berbasis web, masyarakat dapy berperan aktif dalam am pengawasan pupuk bersubsidi, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan aduen melalui web yang tentunya hal ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya publik.
28. Inovasi POKAK mempermudah dan mempercepat proses pencatatan kelahiran dan kematian, khususnya bagi penduduk yang mengalami peristiwa tersebut di rumah sakit,. puskesmas dan fasilitas keschatan lainnya yang telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo

29. SAE JAL merupakan kanal pengaduan pelayanan publik yang Responsif dan Aktif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait kerusakan jalan sehingga dapat lebih cepat dan tuntas dalam proses penanganan permasalahan yang ada di kabupaten probolinggo khususnya Dinas PUPR Kab.Probolinggo.
30. Inovasi YOI BRADER memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah untuk mengakses layanan Bagian Organisasi serta mendukung peningkatan pemanfaatan SPBE dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar lebih efektif dan efisien. Pengguna layanan dapat memperoleh layanan Bagian Organisasi dengan mengakses website organisasi di alamat <https://organisasi.probolinggokab.go.id>.
31. E-PONDES adalah platform digital inovatif yang dikembangkan secara spesifik untuk mengoptimalkan dan menyederhanakan proses pelayanan administrasi desa Sebagai solusi berbasis teknologi, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi warga dalam mengurus beragam dokumen penting yang sebelumnya memerlukan kehadiran fisik di kantor desa.
32. Inovasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem layanan publik yang terintegrasi, responsif, dan berbasis data kependudukan yang terjamin keamanannya dan data terkini, guna meningkatkan efektivitas pelayanan dan ketepatan pengambilan kebijakan di tingkat desa hingga kabupaten.

Demikian penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama.

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Probolinggo, Maret 2026
BUPATI PROBOLINGGO

MOHAMMAD HARIS